

**STRATEGI PEMERINTAHAN DESA SEGARAN KECAMATAN DELANGGU
KABUPATEN KLATEN DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK MENUJU DESA LAYAK ANAK¹**

Oleh :

Octavia Monalisa Bela Dwi Paksi, Triyanto & Rima Vien Permata²

Email : Octaviamonalisa@gmail.com

ABSTRACT

The aims of this research were: (1) to identify the strategies of Segaran Village Government to fulfill the children's right in order to be children proper village, (2) the reveal the obstacles of Segaran Village Government to fulfill the children's right in order to be children proper village, (3) to find out the solutions to handle the obstacles of fulfilling the children's rights in order to be children proper village by Segaran Village Government.

This research applied a descriptive qualitative research. The sources of the data were informants, events, and documents. The sample was chosen by purposive sampling technique. The data were obtained through interview, observation, and document analysis. The researcher triangulated the data obtained and the method used in order to have the valid data. On the other hand, the data were analyzed using interactive model, i.e.: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data display, and (4) drawing conclusion. Meanwhile, the research was done through some procedures, namely: (1) pre-research, (2) data collection, (3) data analysis, and (4) research report writing.

According to the results of the research, it can be summed up that: (1) the strategies of Segaran Village Government to fulfill the children's right in order to be children proper village are by activating BKB cadres, cooperating with some village institutions, upgrading the village infrastructure, enhancing society awarness, applying sekolah sungai programs, applying jemput bola strategy, giving the birth certificate, and allocating the fund estimation of children proper village, (2) the obstacles of the government were the lack of the society awarness about the significance of children proper programs, the lack of the society participation, and the obstruction of the fund estimation, thus, the implementation of some programs were not done well. In addition, some obstacles come from the dense of the society bussiness, the lack of communnication of the society and the government, and the inferiority of the society to respond the programs. The last conclusion deals with the soulution of the problems. The solution applied by the government was continous approaching to the society and arranging the priority according to its importance

¹ Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

level. Additionally, the society keep increasing their participation to be actively involved and be open minded, critical, and smart to implement the programs of the governments.

Keywords: *strategies, Segaran Village government, children right, children proper village.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang padat akan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 ini, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 258 juta jiwa, dengan pembagian jumlah penduduk oleh usia anak yaitu usia dibawah 18 (delapan belas) tahun adalah kurang lebih sebesar 93,4 juta jiwa dari jenis kelamin laki - laki dan perempuan

Hal ini menunjukkan bahwa sepertiga dari jumlah total penduduk Indonesia adalah usia kurang dari 18 tahun, yang mana usia penduduk tersebut dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Mengingat jumlah anak di Indonesia yang cukup banyak dan perannya yang begitu penting bagi masa mendatang, maka sangat di perlukan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk dapat

memberikan jaminan akan kehidupan yang layak bagi anak - anak di Indonesia. Salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab atas kehidupan anak adalah pemerintah, peran dari pemerintah disini dalam rangka meningkatkan kualitas anak di Indonesia sangatlah diperlukan yakni melalui pemenuhan dan perlindungan hak - hak yang dimiliki oleh anak.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak untuk bertanggungjawab dan berkewajiban menjamin pemenuhan hak - hak anak tersebut mulai dari intitusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, Pemerintah Desa atau Kelurahan,

Kecamatan, Pemerintah Kabupaten atau Kota hingga Pemerintah Provinsi.

Pada tahun 2010, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PPPA) memunculkan sebuah program Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak, yang kemudian mendorong terbentuknya kebijakan Desa Layak Anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten atau Kota Layak Anak di Desa atau kelurahan.

Salah satu Kabupaten yang mengintruksikan program Desa Layak Anak adalah Kabupaten Klaten, bentuk konkret adanya kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak di Kabupaten Klaten adalah penerbitan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai Perda Pertama Tingkat Nasional, SK Bupati No. 463/246/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kabupaten Layak Anak, dan SK Bupati No. 463/195/2012 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Klaten. Sementara itu

komitmen Kabupaten Klaten untuk mendorong semua desa menjadi Desa Layak Anak dituangkan di dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut terdapat aspek pemberdayaan dan aspek pembangunan, yang menjelaskan bahwa dana yang ada dan yang sudah dialokasikan ke desa harus digunakan salah satunya untuk memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan anak. Hal ini dimaksudkan agar setiap desa didorong untuk dapat mewujudkan Desa Layak Anak.

Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak di Kabupaten Klaten nyatanya masih kurang terpenuhi. *Pertama*, angka kekerasan pada anak masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Teknis Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Klaten selama tahun 2016 awal terdapat 105 kasus anak berhadapan dengan hukum, yang mana 40 kasus merupakan tindak kekerasan seksual pada anak, selanjutnya meningkat sebanyak 70 persen, di awal tahun 2017 terdapat tujuh anak yang mendapat pendampingan hukum lantaran menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual. *Kedua*, sebanyak 479 anak balita di Klaten dalam kondisi gizi buruk, sementara 2.890 anak balita lainnya mengalami gizi kurang, sebagian gizi buruk dialami

balita setelah menderita penyakit seperti TBC atau infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), Sementara itu 1,1% atau 1.002 balita mengalami kelebihan gizi yang rentan mengidap penyakit diabetes mellitus dan hipertensi ketika dewasa. kondisi anak seperti ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak akan pemenuhan layanan kesehatan masih rendah (Solopos edisi Selasa, 24 Mei 2016 10:35 WIB).

Didalam lingkup lingkungan terdekat bagi anak untuk pemenuhan akan haknya ternyata belum berjalan secara optimal. Sebagai contoh di Desa Segaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten jumlah anak di desa tersebut sebanyak 1.325 jiwa dari total 3.894 jiwa penduduk Desa Segaran, hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak mencapai sepertiga dari jumlah total penduduknya.

Namun pada kenyataannya jumlah anak yang banyak tersebut belum mampu mewujudkan pemenuhan akan hak - hak yang dimiliki oleh anak. Salah satunya adalah dalam pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya , hal ini ditunjukkan dengan kurangnya sarana dan prasarana untuk anak dapat bermain ditempat yang aman dan nyaman, bahkan di desa yang sering kita dengar merupakan tempat yang

luas dan asri, namun demikian kenyataan yang ada tidak mampu memberikan ruang bagi anak untuk sekedar bermain, justru mereka harus bermain ditempat yang membahayakan nyawa mereka.

Dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus, Desa Segaran masih jarang untuk mengadakan penyuluhan - penyuluhan terkait pencegahan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum, hak tersebut dinilai amat penting bagi anak, karena dengan begitu anak memiliki pedoman untuk kehidupan bermasyarakat nantinya. Persoalan lainnya adalah masih kurangnya pemahaman orang tua akan hak - hak yang dimiliki anak, sehingga banyak orangtua yang tidak melakukan bimbingan dan perhatian terhadap anak mereka dengan semestinya, dampak dari hal tersebut adalah pada pendidikan dan pergaulan anak tersebut. Dalam hal pendidikan, masih banyak anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan arahan orangtua untuk belajar bahkan kelanjutan untuk pendidikannya. Hal ini ditunjukkan dari jumlah penduduk yang tamat Strata 1 (S1) dan Diploma III yaitu 58 orang dari total 3.210 warga yang mengenyam pendidikan. Selain itu pergaulan anak juga terkesan bebas. Anak usia Sekolah Dasar sudah mengenal rokok, mewarna rambut,

berkendara motor dengan kebut – kebutan tanpa helm.

Salah satu pihak yang bertanggungjawab dan berkewajiban dalam pemenuhan hak – hak anak di desa adalah pemerintah desa. pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa inilah yang akan mengupayakan terwujudnya Desa Layak Anak di wilayahnya, tentu dalam melaksanakan sebuah program pemerintah membutuhkan strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan program tersebut. Strategi amat sangat diperlukan dikarenakan dengan adanya strategi maka akan tersusun langkah – langkah yang sistematis dan di nilai tepat, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dan dirasakan bersama hasilnya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka sangat penting untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait 1) strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Segaran Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten dalam pemenuhan hak anak menuju Desa Layak Anak. 2) Hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Desa Segaran dalam mewujudkan Desa Layak Anak, serta 3) Solusi yang digunakan dalam menghadapi hambatan mewujudkan Desa Layak Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan hasil penelitian ini memaparkan objek yang diteliti (orang, lembaga atau lainnya) berdasarkan fakta.

A. Data dan Sumber Data

Data kualitatif dalam penelitian ini bersumber dari beberapa informan yang memberikan informasi terkait program Desa Layak Anak, serta informasi terkait pemenuhan hak anak di Desa Segaran. Beberapa informan tersebut antara lain : Kepala Desa Segaran, Kepala Seksi BP3AKBN (Badan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Nasional) Kabupaten Klaten, kepala PAUD Hati Bunda. Kepala TK Aisyah, Kepala SD N Segaran 2, ketua Puskesmas dan posyandu Desa Segaran, Ketua PKK Desa Segaran, Ketua Karang Taruna Garuda, masyarakat Desa Segaran baik orangtua maupun anak.

Data selanjutnya berupa peristiwa yang bersumber dari beberapa kegiatan pertemuan rutin setiap bulan oleh Pak Lurah beserta Stafnya, dan perwakilan setiap RT, kegiatan posyandu, kegiatan pembelajaran di PAUD Hati Bunda,

kegiatan PKK Desa Segaran serta kegiatan Karang Taruna Garuda.

Kemudian terdapat pula data dokumen atau arsip. Data penelitian ini bersumber dari beberapa Undang – Undang, Peraturan Menteri, serta Peraturan Daerah Kabupaten Klaten. Selain daripada sumber hukum diatas, data dokumen juga didukung dengan adanya foto – foto kegiatan yang dilaksanakan di Desa Segaran.

B. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian

Menurut Sugiyono (2015 : 300), dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah “*purposive sampling*, dan *snowball sampling*”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan pertimbangan tertentu, yakni informan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti yaitu Kepala Desa Segaran.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data meliputi:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara semi struktur. Wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tetapi apabila ada umpan balik dari responden yang dirasa perlu ditanyakan, maka peneliti

bisa menanyakan kepada responden walaupun tidak ada dalam pedoman wawancara.

2. Observasi

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat dengan mengamati apa yang dikerjakan informan, mendengarkan yang informan ucapkan, dan mengamati kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data – data dari pihak Pemerintah Desa Segaran. Data – data tersebut bisa berupa gambar – gambar kegiatan dan beberapa landasan hukum berupa Undang – Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah.

D. Teknik Uji Validitas Data

Tahap ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas di lokasi penelitian, untuk menjamin validitas data ini, peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode.

E. Teknik Analisis Data

Tiga komponen dalam menganalisis data selama di lapangan Model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015: 337), sebagai berikut:

1. Reduksi Data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data.
2. Sajian Data, merupakan penyusunan data dalam penelitian yang dilakukan dalam bentuk uraian.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal berdasarkan sajian data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Desa Segaran dalam pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Desa Layak Anak

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan sebuah program pasti membutuhkan suatu strategi. Menurut Stephanie K. Marrus dalam Umar (2005: 31) pengertian strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Desa Segaran mempunyai strategi – strategi terhadap pemenuhan hak – hak anak untuk menuju Desa Layak Anak. Beberapa strategi tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengaktifan Kader program anak Bina Keluarga Balita,

Berdasarkan buku panduan Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita (2010:3) menjelaskan bahwa program Bina Keluarga Balita merupakan salah satu bagian program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional, dan sosial ekonomi dengan sebaik baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi – fungsi keluarga.

Pengaktifan kembali kader Program Anak Bina Keluarga Balita merupakan wujud respon dan komitmen Pemerintah Desa Segaran dalam menanggapi kebijakan Pemerintah Pusat yaitu untuk mempercepat implementasi Kabupaten Layak Anak dengan melalui kebijakan Desa Layak Anak dalam

pemenuhan hak Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Segaran juga tetap berencana untuk melahirkan regenerasi dari kader – kader yang sudah ada, sehingga keberlangsungan program Desa Layak Anak di Desa Segaran tidak akan terhambat dengan persoalan ketidak adanya tenaga SDM.

b. Bekerja sama dengan berbagai lembaga di bawah Pemerintah Desa Segaran antara lain

1) PAUD Hati Bunda, TK Aisyah, SD N Segaran 1 dan 2,

Berdasarkan Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2003, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Strategi Pemerintah Segaran terkait dengan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan ini guna mewujudkan program Desa Layak Anak adalah melalui pengoptimalan pendidikan di usia dini. Desa Segaran sejak dua tahun terakhir sudah

memiliki lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Hati Bunda.

Paud Hati Bunda merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Desa Segaran guna meningkatkan pendidikan di Desa Segaran khususnya anak usia dini, hal ini sejalan dengan pendapat Martini (2006) bahwa pendidikan harus sudah dimulai sejak usia dini supaya tidak terlambat, sehingga penting bagi anak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Selanjutnya, strategi pemerintah Desa Segaran dalam pemenuhan hak Pendidikan dan Waktu luang adalah dengan melakukan berbagai usaha guna membangkitkan kembali eksistensi TK milik Desa Segaran yakni TK Aisyah, berbagai usaha tersebut antara lain melakukan renovasi gedung TK yang mulai rusak, menyediakan fasilitas yang lengkap bagi kegiatan pembelajaran mulai dari buku materi hingga peralatan kegiatan pembelajaran serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Segaran terkait keberadaan TK Aisyah.

Kedaaan TK Aisyah yang mengalami kemuduran memberikan dampak yang cukup besar karena sebagian orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya ke TK desa sebelah. Hal ini membuktikan bahwa tidak efisiennya alokasi investasi mengakibatkan masalah yang

tidak berguna dan pada akhirnya memerlukan investasi yang besar untuk perbaikan. Hal inilah yang membuat Pemerintah Desa mulai melakukan renovasi dan penataan ulang untuk menghidupkan kembali eksistensi TK yang di miliki oleh Desa Segaran.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mulai berbuah manis. Kini TK Aisyah telah hidup kembali dengan sarana dan prasarana yang lengkap, bangunan yang sudah di renovasi sesuai dengan suasana belajar untuk anak – anak yang nyaman, serta materi pembelajaran yang lebih baik, dan kini jumlah murid di TK Aisyah mengalami kelonjakan hamir 100 persen bahkan di ketahui bahwa beberapa murid merupakan warga dari desa sebelah, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan TK Aisyah Desa Segaran tidak hanya memenuhi hak pendidikan bagi warganya sendiri saja melainkan juga untuk anak – anak yang berada di luar desa Segaran.

Selain PAUD Hati Bunda dan TK Aisyah yang berkontribusi dalam pemenuhan hak – hak anak, terdapat pula Sekolah Dasar Negeri Segaran 1 dan 2 yang juga berkomitmen dalam pemenuhan hak anak sebagai perwujudan usaha menuju Desa Layak Anak.

Komitmen ini ditunjukkan dengan pemenuhan sarana dan

prasarana yang lengkap dalam proses pembelajaran disekolah, selain itu sekolah juga secara rutin mengikuti pengarahan yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Delanggu terkait advokasi menjadi Sekolah Ramah Anak.

2) Karang Taruna Garuda

Warastuti (2006) menyatakan bahwa organisasi kepemudaan adalah lembaga non formal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Anggota dari Organisasi tersebut tentu saja adalah para pemuda dan pemudi. Organisasi kepemudaan lebih mengarah kepada kegiatan sosial karena merupakan wujud kesadaran untuk membantu sesama.

Karang Taruna Garuda Desa segaran memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Divisi Social Service center, Divisi minat dan bakat, Divisi Kerohanian, serta Divisi Pengembangan organisasi. Salah satu divisi pada karang taruna Garuda yaitu Divisi social service center merupakan divisi atau bidang seksi yang bertugas dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan Karang Taruna Garuda dan forum muda mudi di Desa Segaran menunjukkan bahwa kerja

sama antara organisasi tersebut dengan Pemerintah Desa Segaran memberikan kontribusi yang besar dalam partisipasi menuju Desa Layak Anak. sesuai dengan Anita Lie (2005: 28) mengemukakan bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam kelangsungan hidup manusia.

3) Posyandu dan Puskesmas

Di dalam buku Pedoman Departemen Kesehatan (2006:11) dijelaskan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Keberadaan posyandu dan puskesmas sebagai lembaga kesehatan di Desa Segaran memegang peran penting dalam menunjang program Pemerintah Desa Segaran. Kedua akan saling bekerja sama dalam hal pemenuhan hak anak khususnya hak kesehatan dasar dalam rangka perwujudan Desa Layak Anak di Desa Segaran.

4) PKK desa Segaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 bahwa, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Strategi yang dilakukan pemerintah Desa Segaran melalui kerjasama dengan lembaga PKK bertujuan untuk mewujudkan kemandirian keluarga, sehingga keluarga terhindar dari kerentanan. Melalui program - program yang ada maka diharapkan Penguatan terhadap peran keluarga ini mendorong pemenuhan hak dasar anak seperti pengasuhan, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan papan yang akan berkontribusi terhadap terhindarnya anak dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan, pornografi anak dan pelanggaran lainnya.

c. Pembangunan infrastruktur desa yang terdiri dari :

1) Pembangunan jalan

Komitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak juga didukung oleh Pemerintah Desa Segaran yaitu dengan memfasilitasi dan mengadvokasi tersedianya rute aman bagi anak bersekolah. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), dijelaskan bahwa Rute Aman Selamat Sekolah merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan Jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman Menuju sekolah.

Komitmen Pemerintah Desa terkait penerapan Rute Aman Selamat Sekolah diwujudkan dengan pembangunan jalan pintasan yang aman bagi anak ketika menuju sekolah. Awalnya rute tersebut merupakan jalan kosong disamping persawahan yang merupakan jalan pintasan menuju kearah sekolah. Pemerintah Desa Segaran memutuskan untuk mengalokasikan jalan tersebut menjadi jalan pintasan bagi anak – anak yang

hendak menuju ke sekolah, sehingga untuk menuju sekolah anak – anak tidak perlu melalui jalan raya lalu lintas berkendara para warga yang hendak menuju keluar desa.

2) Pengadaan Perpustakaan Desa

Keberadaan perpustakaan desa ini merupakan salah satu pemenuhan hak Pendidikan Dasar dan Pemanfaatan Waktu Luang. Perpustakaan desa ini bertempat di salah satu rumah warga yang memang diserahkan kepada Pemerintah Desa Segaran guna keperluan kegiatan desa.

Menurut Darmono (2006) keberadaan perpustakaan desa memiliki fungsi yang penting antara lain sebagai fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi rekreasi, dan fungsi pelestarian. Selanjutnya menurut Standar Nasional Perpustakaan (005 : 2011) bahwa tujuan perpustakaan desa adalah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan ilmu pengetahuan dan akses informasi untuk meningkatkan keterampilan pendidikan, ilmu pengetahuan, aspirasi budaya, dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayati.

Keberadaan perpustakaan di Desa Segaran ini bertujuan untuk menjadi sarana belajar masyarakat desa Segaran. Buku – buku yang ada pula terdiri dari berbagai referensi

jenis buku. Terdapat buku pengetahuan bagi anak – anak sekolah hingga buku – buku umum yang berisikan berbagai kegiatan kehidupan sehari – hari seperti pengetahuan pertanian, wirausaha, dan sebagainya.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- 1) Sosialisasi terkait program Desa Layak Anak. Sosialisasi tersebut diinformasikan melalui lembaga – lembaga yang desa yang ada
- 2) Sosialisasi Motivator Parenting. Kegiatan sosialisasi Motivator Parenting ini dilaksanakan oleh pihak puskesmas desa di PAUD Hati Bunda.
- 3) Sosialisasi terkait Gizi baik melalui sarapan yang sehat. sosialisasi ini dilakukan di PAUD Hati Bunda, TK Aisyah, SD N Segaran 1 dan 2.
- 4) Sosialisasi terkait menggosok gigi. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh PAUD Hati Bunda, Tk Aisyah, SD N Segaran 1 dan 2.
- 5) Sosialisasi pendidikan reproduksi bagi remaja. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2017.
- 6) dll

e. Program Sekolah Sungai

Selain beberapa strategi diatas terkait pemenuhan hak pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya serta hak Perlindungan Khusus bagi anak, Pemerintah Desa Segaran juga sedang

mempersiapkan sebuah program yaitu “Sekolah Sungai” yang mana pemerintah Desa Segaran melalui program ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klaten, BBWS Bengawan Solo, LPB Muhammadiyah Klaten, dan Forum Komunikasi Bank Sampah.

Pemerintah Desa Segaran memanfaatkan program tersebut untuk dapat memberikan pendidikan dasar bagi anak untuk dapat mencintai lingkungan sejak kecil, didalam program Sekolah Sungai tersebut akan ada kegiatan bagi anak seperti bercocok tanam dan belajar beternak ikan serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan. Diharapkan melalui program Sekolah Sungai ini Desa Segaran mengalami suatu peningkatan baik Sumber Daya Alam yang terus menerus dilestarikan serta Sumber Daya Manusia yang terus menerus ditingkatkan pengetahuannya. Selain menjadi sarana pemenuhan dalam hak Pendidikan Dasar dan Pemanfaatan Waktu Luang, kegiatan ini juga merupakan pemenuhan hak Perlindungan Khusus yaitu salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam.

f. Strategi jemput bola dalam pemberian Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak identitas sebagai anak yang di akui. Dengan adanya akta kelahiran maka akan mengurangi persoalan ketidakjelasan identitas anak, yang mana akan membawa sejumlah dampak seperti adanya diskriminasi, kesulitan dalam mengakses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, diketahui bahwa Pemerintah Desa Segaran menerapkan sistem jemput bola, yang mana sistem ini adalah pemberian layanan kepada masyarakat desa segaran terkait dengan pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Segaran Bp Mas Padang Setiawan di ketahui bahwa ditiap RW telah ditetapkan satu perangkat desa yang menjadi koordinator, koordinator ini bertugas untuk memberikan pengarahan dan pendampingan bagi warga yang akan membuat akta kelahiran bagi anak mereka. Pengarahan dan pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat untuk

dapat bertindak aktif, namun tetap dibekali dan didampingi oleh Pemerintah.

g. Alokasi anggaran desa guna pelaksanaan program Desa Layak Anak

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan Berkaitan dengan infrastuktur dana pelaksanaan program Desa Layak Anak, Desa Segaran tidak secara rinci menjelaskan program – program yang dilaksanakan dalam setiap pembiayaan.

Dana yang dikhususkan guna melaksanakan suatu program yang berkaitan dengan hak anak tidak disebutkan dalam perincian anggaran desa. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Segaran dikatakan bahwa dana khusus untuk program anak sudah terintegrasikan ke dalam rincian anggaran desa melalui beberapa daftar pembiayaan yakni dalam pembiayaan bidang pembangunan desa, penyelenggaraan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Program anak yang terintegrasi ke dalam rincian anggaran desa melalui beberapa daftar pembiayaan salah satunya adalah didalam pembiayaan bidang pembangunan desa, hal ini ditrianggulasikan dengan adanya pembangunan jalan pintas ditengah sawah, salah satu tujuannya

adalah untuk memberikan rute aman bagi anak yang hendak menuju ke sekolah, selanjutnya dalam pembiayaan bidang pemberdayaan masyarakat ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan penunangan program Desa Layak Anak di Desa Segaran.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Segaran dalam pemenuhan hak anak menuju Desa Layak Anak

Dalam melaksanakan strategi yang ada juga menghadapi beberapa hambatan yang muncul baik dari pihak Pemerintah Desa maupun dari masyarakat desa Segaran. Hambatan dari Pemerintah Desa Segaran yaitu *Pertama*, sulitnya mengubah paradigma masyarakat akan pentingnya program anak. *Kedua* kurangnya memahami prosedur kebijakan Desa Layak Anak, dan *ketiga* Adanya prioritas yang berkenaan dengan anggaran yang menyebabkan tidak semua program anak dapat terlaksana.

Sementara itu hambatan juga dialami oleh beberapa masyarakat Desa Segaran yaitu sibuk dengan pekerjaannya dan kurang komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Segaran serta rasa rendah diri dan tertutupnya masyarakat akan responnya terhadap program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

3. Solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak anak menuju Desa Layak Anak

Dalam menghadapi suatu hambatan yang ada perlu untuk mendapatkan pula solusinya. Dalam menghadapi hambatan yang ada Pemerintah Desa Segaran memiliki solusi yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada semua masyarakat desa Segaran secara terus menerus serta selalu memperkenalkan program Desa Layak Anak yang hendak di capainya, selain itu dalam menghadapi hambatan yang berkenaan dengan anggaran, Pemerintah Desa Segaran terus memperhatikan dan memilah setiap program yang ada untuk dapat di prioritaskan tingkat kepentingannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pemerintah Desa Segaran dalam pemenuhan hak – hak anak menuju Desa Layak Anak yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pengaktifan Kader program anak Bina Keluarga Balita,

- b. Bekerja sama dengan berbagai lembaga di bawah Pemerintah Desa Segaran antara lain PAUD Hati Bunda, TK Aisyah, SD N Segaran 1 dan 2, Karang Taruna Garuda, Posyandu, Puskesmas, dan PKK desa Segaran.
- c. Pembangunan infrastruktur desa yang terdiri dari :
- 3) Pembangunan jalan
 - 4) Pengadaan Perpustakaan Desa
- d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
- 1) Sosialisasi terkait program Desa Layak Anak
 - 2) Sosialisasi Motivator Parenting
 - 3) Sosialisasi terkait Gizi baik
 - 4) Sosialisasi terkait menggosok gigi
 - 5) Sosialisasi pendidikan reproduksi bagi remaja
 - 6) Sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA
 - 7) Sosialisasi pencegahan pekerja anak
 - 8) Kegiatan Screnning
- e. Program Sekolah Sungai
- f. Strategi jemput bola dalam pemberian Akta Kelahiran
- g. Alokasi anggaran desa guna pelaksanaan program Desa Layak Anak
2. Dalam melaksanakan strategi yang ada juga menghadapi beberapa hambatan yang muncul baik dari pihak Pemerintah Desa maupun dari masyarakat desa Segaran.
- a. Hambatan dari Pemerintah Desa Segaran yaitu :
- 1) Masih kurangnya pemahaman beberapa masyarakat Desa Segaran terkait dengan pentingnya program anak.
 - 2) Kurangnya pasrtisipasi beberapa masyarakat,
 - 3) Adanya prioritas yang berkenaan dengan anggaran yang menyebabkan tidak semua program anak dapat terlaksana.
- b. masyarakat Desa Segaran yaitu :
- 1) Sibuk dengan pekerjaannya
 - 2) Kurang komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Segaran serta
 - 3) Rasa rendah diri dan tertutupnya masyarakat akan responnya terhadap program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
3. Dalam menghadapi suatu hambatan yang ada perlu untuk mendapatkan pula solusinya.
- a. Solusi dari Pemerintah Desa Segaran yaitu :
- 1) dengan cara melakukan pendekatan kepada semua masyarakat desa Segaran secara terus menerus serta selalu memperkenalkan program Desa Layak Anak yang hendak di capainya,
 - 2) Dalam hal anggaran, Pemerintah Desa Segaran terus memperhatikan dan memilah setiap program yang

ada untuk dapat di prioritaskan tingkat kepentingannya.

Pada dasarnya permasalahan anggaran masih dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Segaran dengan cara menjalin kerja sama dengan lembaga – lembaga yang berkenaan dengan hak anak seperti LSM ataupun komunitas – komunitas penggagas hak anak.

b. Solusi dari masyarakat Desa Segaran yaitu :

- 1) cara terus aktif dalam setiap kegiatan desa salah satunya PKK bagi ibu – ibu, pertemuan rutin bapak – bapak serta kegiatan karang taruna atau muda – mudi bagi para pemuda dan pemudi desa Segaran serta masyarakat harus dapat lebih terbuka, kritis dan cerdas terhadap program – program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Segaran.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran. Adapun saran yang diberikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Desa Segaran
 - a. Berkaitan dengan masih sulitnya merubah paradigm masyarakat akan pentingnya program anak, menurut peneliti pemerintah Desa Segaran perlu memberikan sebuah

kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan berbagai pihak dari luar desa dan melaksanakan strategi secara terus menerus.

- b. Terkait persoalan anggaran, Pemerintah Desa Segaran perlu memperbaiki pengelolaan anggaran desa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Segaran kurang memperinci anggaran untuk program - program khusus, salah satunya disini adalah program anak, sehingga persoalan dana tidak selalu dikarenakan besar atau kecilnya nominal dana tersebut namun karena pengelolaannya yang perlu diperbaiki kembali.

Selain itu Pemerintah Desa Segaran dapat menjalin kerja sama dengan pihak LSM yang berkaitan dengan anak seperti, Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Kabupaten Klaten , Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Klaten, sehingga dengan begitu dana yang keluar dapat dioptimalkan sebaik mungkin untuk kegiatan yang lainnya.

- c. Perlunya dibentuk lembaga Gugus Anak atau Forum anak yang betul – betul memperhatikan keadaan anak – anak di Desa Segaran, yang mana lembaga tersebut akan menemukan permasalahan – permasalahan pada anak di masyarakat, sehingga nantinya akan menemukan solusi yang tepat.

2. Bagi Masyarakat
- a. Berkaitan dengan sibuknya masyarakat dan kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa Segaran dengan masyarakat, maka sangat penting untuk dapat bergabung dalam sebuah kegiatan dilingkungan masyarakat, karena dengan kita aktif dalam sebuah kegiatan maka kita juga dapat berpartisipasi serta mengetahui perubahan maupun perkembangan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Alderson, Priscilla. 2001. Research by Children: rights and methods. *International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice*, 4 (2), 139-153.
- Al-Barry, M. Dahlan, L.lia Sofyan Yacob. 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah ; Seri Intelektual, Surabaya : Target Press
- Anita. Lie. 2005. Cooperative Learning di Ruang – ruang Kelas, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Anthony, R.N. dan V. Govindarajan, 1995. Management Control System. 8th edition. Irvin mc. Graw hills. Boston.
- Anwar Arifin, strategi Komunikasi, 1984, Bandung : Armilo
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. 1989. Jakarta: Akademi Presind
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta
- As'ad Human, Budiyanto. 1995. Pedoman Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan TPA-TPA Nasional. Yogyakarta: LPTQ Nasional.
- Awang, Azam. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2010
- Bambang Hariadi. Strategi Manajemen. 2005. Malang : Bayumedia Publishing
- Chiras, Daniel D. 1991. Environmental Sciene: Actionpor a Sustainable Future. California: The Benjamin/Cummings Pub.co.inc
- Darmono. 2006. Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia
- David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategi, 2003. Yogyakarta : Andi Gursoy, Guner. 2009. *A strategic shift of automobile manufacturing firms*

- in Turkey*. Published in: *Int. J. Business and Emerging Markets*, 1 (3), 214.
- Depkes RI, 2006. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta : Depkes RI
- Fadillah, T. Yuliana. 2013. *Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Volume 11 No 2
- Fattah, N. 2005. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Grant, Robert M. (1995). *Analisis Strategi kewirusahaan konsep, teknik dan aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. 2002.
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press. Hessel
- HAW, Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hurlock, E. B. 1994. *Psikologi Perkembangan (Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan)*. Jakarta: Erlangga
- Jamaris, Martini. 2006. *Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak – Kanak*. Jakarta : Gramedia
- Joan, Freeman. 1995. *How To Raise a Bright Child*. London : Vermillion
- Karen Lebacqz. *Teori – teori Keadilan*. 1986. Bandung : Penerbit Nusa Media
- Matthew B. Milles, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI PRESS
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Munzier Suparta dan Hajani Hefni. *Metode Dakwah*. 2006. Jakarta : Rahmat Semesta
- Nawawi, Hadari, dkk. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Orama, Krista. 2009. *Child-led organisations and the role of adult professionals*. 1, (2), 5
- Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa atau Kelurahan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Mengengah
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis

- Kabupaten / Kota Layak Anak di Desa / Kelurahan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten
- Perda Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. 2003. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Pudjiadi, Solihin. 2003. Ilmu Gizi Klinis Pada Anak Edisi ke empat. Jakarta : FK UI
- Setiawan Hari Purnomo. Manajemen Strategi : Sebuah Konsep Pengantar. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siregar D. Doli. 2004. Management Asset. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Suyanto, Slamet. 2005. Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Solopos Edisi Selasa, 24 Mei 2016 10:35
- Sri Hayati. 1999. Wawasan Ekologis Global Masyarakat Kota Bandung. Disertasi. Jakarta : PPS-UNJ
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). 2015. : Bandung : Penerbit CV. Alfabeta
- Suwarno, 1995. Pengantar Umum Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta.
- Swan, James A. dan Stapp, William B. 1974. Environmental Education: Strategies Toward a More Livable Future. N.Y. London : Johnwiley dan Sons
- Theresia, Meak. 2011. Mewujudkan Desa Pintar Melalui Perpustakaan Desa. Tersedia di <http://www.batukar.info/komunitas/articles/mewujudkan-desapintar-melalui-perpustakaan-desa>. Diakses tanggal 11 Januari 2018

- Thoha, Miftah. 2000. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Arga Kencana Abadi
- Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Usman, Wan. 1996. *Makalah Semlok. Rencana Pembangunan*. Jakarta : PKN UI
- Warastuti. 2006. *Peran Lembaga Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan*
- Wina sanjaya. *Strategi Pembelajaran*. 2007. Jakarta : Kencana Predia Media Group
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winataputra, Udin S.dkk. 2008. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko
- Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- www.duniapsikologi.com (Damayanti.1992) Pengertian anak-tinjauan kronologis dan psikologis. Di akses pada tanggal 29 Maret 2017
- www.Kemendikbud.co.id diakses pada tanggal 10 Mei 2017
- [www. Business Watch Indonesia \(BWI\).co.id](http://www.Business Watch Indonesia (BWI).co.id) diakses pada tanggal 12 Juni 2017
- [www. Lembaga Pelayanan Hukum ECPAT.co.id](http://www.Lembaga Pelayanan Hukum ECPAT.co.id) diakses pada tanggal 12 Juni 2017
- www.kpai.co.id diakses pada tanggal 13 Juni 2017
- www.kla.id diakses pada tanggal 15 Juni 2017